



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI, KAMIS 17-10-2024



RINGKASAN BERITA HARI INI

Jembatan Kedungpeluk Ditargetkan Rampung Akhir November



KERJAJARAN: Jembatan permanen Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi dalam proses pembangunan.

CANDI-Jembatan Bailey di Kedungpeluk Kecamatan Candi telah kembali beroperasi setelah sempat ditutup dari Senin (7/10) hingga Sabtu (12/10). Untuk pemasangan double U box sudah selesai dan kendaraan kini bisa melintas.

Selesai pemasangan, jembatan Bailey atau jembatan sementara yang ada di lokasi dapat digunakan kembali. Saat ini petugas sedang menyelesaikan bagian permukaan jembatan permanen.

"Jembatan permanen tersebut dibangun karena jembatan Kedungpeluk ambruk pada 16 Juli lalu," ujarnya. Selama periode pembangunan, warga setempat menggunakan jembatan sementara untuk beraktivitas. Jembatan permanen nantinya memiliki lebar tujuh meter dan panjang 21 meter.

"Saat jembatan permanen selesai dibangun, jembatan Bailey milik Provinsi Jawa Timur akan dibongkar," jelasnya.

Ke Halaman 10

Debat Perdana Dibagi dalam Enam Segmen

SIDOARJO - Debat perdana kontestan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilbup) Sidoarjo 2024 bakal digelar Sabtu (19/10) malam mendatang. Temanya sudah ditetapkan, yakni soal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. KPU telah menyelesaikan teknis persiapan pelaksanaan debat edisi pertama itu, termasuk para panelis yang akan dilibatkan. "Debat berlangsung selama dua jam dan terbagi dalam enam segmen," kata Ketua KPU Sidoarjo Fauzan Adhim. Dia menjelaskan, dalam debat tersebut, setiap pasangan calon (paslon) diberi kesempatan untuk menyampaikan visi misi masing-masing. Mereka juga bakal mengikuti sesi pendalaman visi misi. Setelah itu, seluruh paslon bakal mendapatkan pertanyaan dari panelis, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antar paslon.

Rencana Debat Perdana Kontestan Pilbup Sidoarjo

- Ditaksanakan pada Sabtu, 19 Oktober 2024
- Durasi: Dimulai pukul 19.00 WIB selama dua jam
- Terbagi dalam enam segmen

Temas: Kesejahteraan masyarakat

Panelis: KPU menyiapkan lima panelis yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi (baik negeri maupun swasta)

Sumber: KPU Sidoarjo

KPU Siapkan Debat Perdana Cabup-Cawabup

KOTA-Debat pertama Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo akan berlangsung di Favehotel, Sabtu (19/10). Kegiatan direncanakan berlangsung selama dua jam, mulai pukul 19.00 hingga 21.00.



Ketua KPU Sidoarjo Fauzan Adhim mengatakan, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subar di-Mimik Idyana dan Achmad Ami Aslichin-Edy Widodo akan mengikuti deba. Debat tersebut akan terdiri dari enam segmen yang telah ditentukan.

"Segmen pertama akan mencakup pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi misi masing-masing pasangan calon, selanjutnya, segmen kedua dan ketiga akan membahas lebih dalam mengenai visi misi yang telah disampaikan," ucapnya.

"Baru di segmen keempat dan kelima ada pertanyaan dari panelis dan tanya jawab dari paslon, dan segmen keenam akan menjadi bagian penutup dari keseluruhan debat," imbuhnya. KPU Sidoarjo juga mengatur kehadiran peserta di arena debat. Masing-masing pasangan calon diizinkan membawa perwakilan dari partai pengusung dan 20 orang pendukung.

Cabup Subandi Bikin Simpati Warga Perumahan Puri Surya Jaya

KOTA-Suasana penuh kebahagiaan menyelimuti pertemuan antara Calon Bupati Sidoarjo Subandi, dengan warga Perumahan Puri Surya Jaya Gedangan. Di tengah ramainya dukungan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Subandi-Mimik (BAIK), Subandi kembali mendapat simpati dari warga setempat dalam sebuah diskusi interaktif yang digelar di salah satu rumah makan di kawasan tersebut.



KOMPAS: Cabup Subandi bertemu warga Perumahan Puri Surya Jaya.

Subandi didampingi oleh Yasin, salah satu tokoh agama setempat, sekaligus puluhan tokoh masyarakat, termasuk Ketua RW, RT, takmir masjid, serta pemuda Karang Taruna. Subandi dengan ramah dan penuh semangat membahas visi dan program kerjanya untuk membangun Kabupaten Sidoarjo ke depan, yang berhaluan demokratis perhatian warga. Dalam kesempatan tersebut, Subandi menjelaskan 14 program unggulan yang diusung pasangan BAIK. Beberapa program lain yang juga mencipatakan 100.000 lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, kelanjutan proyek betonisasi, pemberian beasiswa kepada anak yatim-piatu serta santiaf dan mahasiswa, layanan kesehatan gratis melalui BPJS, serta insentif bagi tenaga pendidik seperti guru ngaji, guru TK hingga SMP, dan tenaga kesehatan.



DEKLARASI: Achmad Amir Aslichin saat menerima dukungan dari Ikatan Pedagang Pasar Masyarakat Indonesia Prambon di Pasar Rakyat Desa Bendotretak, Prambon.

Mas Iin Siap Perbaiki Kesejahteraan Pedagang

SIDOARJO - Pasangan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) Achmad Amir Aslichin-Edy Widodo (Sae) terus menggalang dukungan dari berbagai elemen, tak terkecuali para pedagang pasar maupun pelaku UMKM. Mas Iin, sapaan akrab Achmad Amir Aslichin, mengaku mendapat banyak aspirasi dari para pedagang pasar tradisional. "Mereka (pedagang, Red) ingin ada perubahan. Karena itu, kami siap memperjuangkan aspirasi mereka," ujar Mas Iin.

Dia menceritakan, salah satu dukungan itu datang dari Ikatan Pedagang Pasar Masyarakat Indonesia Prambon. Dukungan para pedagang diberikan secara sukarela, sebab mereka berharap pasangan Sae bisa membawa perubahan positif bagi para pedagang. "Ini tambahan semangat baru untuk membangun Sidoarjo," ujarnya. Dia menjelaskan, salah satu aspirasi yang diterima dari para pedagang adalah soal perbaikan kesejahteraan. "Mereka ingin usahanya bisa lancar, ramai, dan berkembang," katanya. (uzi/ris)



INTERAKTIF: Subandi bersama warga Perumahan Puri Surya Jaya, Gedangan, dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin (14/10) malam.

Subandi Sambangi Warga, Janji Benahi Layanan Dasar

SIDOARJO - Salah satu kegiatan yang cukup sering dilakukan calon bupati (cabup) Subandi adalah mengunjungi masyarakat di wilayah permukiman. Seperti pada Senin (14/10) malam, dia menemui warga Perumahan Puri Surya Jaya, Gedangan.

Dia sana, dia bertemu dengan sekitar 150 warga, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, dan ibu-ibu penggerak PKK. Mereka terlibat dalam diskusi interaktif selama lebih dari dua jam. Dalam pertemuan itu, selain menyampaikan visi-misinya di berbagai sektor, Subandi menjanjikan peningkatan layanan dasar bagi warga Sidoarjo. Salah satunya adalah kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu lewat optimalisasi BPJS Kesehatan. "Kami akan memberikan akses layanan kesehatan yang lebih baik sehingga tidak ada lagi warga yang kesulitan berobat," ujarnya.

Program lainnya adalah pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan siswa berprestasi serta penyediaan fasilitas belajar yang memadai. Dia juga menjanjikan pembangunan infrastruktur desa yang lebih merata. (uzi/ris)

Cabup Paslon No 2 Didukung Pedagang Pasar Prambon

KOTA-Ikatan Pedagang Pasar Masyarakat Indonesia resmi deklarasi menyatakan dukungan mereka kepada pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Achmad Amir Aslichin-Edy Widodo (Sae). Deklarasi ini digelar di pasar rakyat Desa Bendotretak, Kecamatan Prambon.



APRESIASI: Cabup Mas Iin dan Cawabup Abah Edy saat bertemu dengan pedagang pasar Prambon.

Para pedagang yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Pasar Masyarakat Indonesia menegaskan bahwa dukungan tersebut diberikan secara sukarela oleh para pedagang yang menginginkan perubahan di Kabupaten Sidoarjo, khususnya Prambon. Para pedagang, menyatakan keinginannya bahwa pasangan Mas Iin dan Abah Edy akan membawa perubahan positif bagi para pedagang. Ia menyebutkan, keinginan para pedagang mencerminkan harapan besar masyarakat untuk perubahan. "Dukungan ini memacu semangat kami untuk membawa Sidoarjo lebih baik. Pedagang ingin ada perubahan, dan kami siap memperjuangkan aspirasi mereka," kata Mas Iin.

KPU Siapkan Debat...

Selain itu, KPU juga akan mengundang Forkopimda dan tokoh masyarakat. Seperti Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Sidoarjo dan Ketua Muhammadiyah Sidoarjo.

"Kami berharap semua paslon bisa mentaati aturan tersebut dengan tidak membawa pendukungnya ke lokasi debat," jelasnya. Untuk menghindari kerumunan massa pendukung, KPU Sidoarjo menghimbau pasangan calon untuk

menggelar nonton bareng di posko masing-masing. Supaya para pendukungnya dapat menyaksikan acara debat. "Pemkab Sidoarjo juga rencananya menggelar nonton bareng di Alun-alun, jadi para simpatisannya bisa melihat acara debat," pungkasnya. (sai/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Sidoarjo Gelar Rapat Koordinasi dengan KPK, Tegaskan Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi

HUKUM



Dianpratiwi – 16 Okt 2024

f Facebook

X Twitter

Pinterest

in LinkedIn



Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, DPRD Sidoarjo menggelar rapat koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang paripurna DPRD, Selasa (15/10/2024).

Sidoarjo – Dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan, DPRD Sidoarjo mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (15/10/2024). Acara yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sidoarjo ini menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan sinergitas antara pemerintah daerah, legislatif, dan para pemangku kepentingan dalam pencegahan korupsi. Fokus utama rakor ini adalah peningkatan Indeks Integritas dan Monitoring Center of Prevention (MCP).

H. Abdillah Nasih Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, dalam sambutannya menyatakan bahwa sosialisasi dari KPK sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan. "Kita perlu mendapatkan sosialisasi dari KPK terkait pencegahan korupsi agar seluruh aparatur memahami pentingnya integritas dan akuntabilitas

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

dalam menjalankan tugas mereka, ucapnya.

Mengantisipasi Modus Korupsi di Daerah

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa korupsi masih kerap terjadi di pemerintahan daerah dan pusat. Jenis kasus yang sering terungkap mencakup penyuapan serta pengadaan barang dan jasa. "Kasus yang masih sering kami jumpai adalah penyuapan, kemudian pengadaan barang dan jasa dengan modus seperti mark up harga dan keterlibatan dalam pelaksanaan proyek dengan swasta," ujar Didik.

Fenomena ini menandakan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tindakan korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi ancaman serius. Didik menambahkan bahwa kolaborasi antara lembaga seperti KPK dan pemerintah daerah sangat penting untuk memotong rantai korupsi.



Mengidentifikasi Potensi Korupsi

Irawati, anggota Satgas Pencegahan Direktorat III KPK, memberikan penjelasan lebih rinci mengenai area yang paling berisiko terhadap korupsi. Ia menjabarkan tujuh titik potensi risiko korupsi, yang mencakup perencanaan, penganggaran, manajemen ASN, pajak daerah, pelayanan publik, pengadaan, serta pengelolaan barang milik daerah.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

“Rakor ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa tidak ada upaya korupsi pada proses perencanaan dan penganggaran APBD tahun 2025,” terang Irawati. Dalam hal ini, fokus pemerintah daerah dan DPRD Sidoarjo adalah memastikan bahwa seluruh proses administrasi dan penganggaran berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih

Selain membahas potensi-potensi tersebut, rakor ini juga merupakan momentum bagi DPRD Sidoarjo untuk mengajak semua pihak bekerja sama dalam pencegahan korupsi. Irawati menekankan pentingnya kolaborasi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. “Mari kita bersama-sama melakukan pencegahan korupsi demi mewujudkan good government yang baik,” imbuhnya.

Langkah-langkah proaktif seperti rakor ini diharapkan dapat menurunkan angka korupsi di Kabupaten Sidoarjo, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan integritas yang tinggi di antara aparatur negara. Dengan sinergi yang kuat antara KPK, pemerintah daerah, dan semua stakeholder, diharapkan ke depannya tindakan korupsi dapat semakin ditekan.

Menanti Tindak Lanjut

Rakor ini menjadi salah satu pijakan penting dalam penegakan good governance di Kabupaten Sidoarjo. Seluruh pihak berharap, melalui pengawasan dan koordinasi yang baik, agenda-agenda pembangunan daerah bisa terlaksana tanpa ada praktik korupsi, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab KPK atau pemerintah semata, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, cita-cita untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan semakin mendekati kenyataan.



Graha Abinaya Dari DPD REI Jatim

Media Sorot Mata 16 Oktober 2024



SIDOARJO/SOROTMATA.COM – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meraih penghargaan Karmika Graha Abinaya dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur. Penghargaan tersebut diterima Pjs. Bupati Sidoarjo Muhammad Isa Ansori pada Musyawarah Daerah (Musda) ke – XVI 2024 DPD REI Jawa Timur, di Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (16/10/2024).

penghargaan Kategori Karmika Graha Abinaya diberikan kepada kepala daerah yang berjasa dan berkomitmen terhadap pengembangan pembangunan perumahan.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bentuk komitmen kepala daerah terhadap pengembangan dan pembangunan perumahan terlihat dari tersedianya beberapa pendukung investasi.

Pjs. Bupati Sidoarjo Muhammad Isa Ansori berterima kasih atas apresiasi yang diberikan REI Jawa Timur. Ia mengatakan Pemkab Sidoarjo akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, khususnya dalam memberikan perizinan.

“Perizinan yang mudah, cepat dan memberikan layanan terbaik kepada investor yang berinvestasi adalah nilai plus bagi Pemkab Sidoarjo. Tentunya, juga harus sesuai aturan dan didukung dengan dokumen-dokumen kelengkapan terpenuhi, pasti perizinan akan cepat selesai,” ucapnya Isa

Isa Ansori juga mengungkapkan penghargaan tersebut bisa menjadi upaya mendorong para pengembang perumahan untuk membangun lebih banyak rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan dan stunting.

“Ini langkah yang spektakuler untuk membangun rumah layak bagi masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah. Rumah yang layak menjadi syarat utama dan menjadi salah satu indikator dalam kategori penurunan angka kemiskinan,” Ungkapnya.

Ia pun berharap penghargaan ini dapat menjadi semangat Pemkab Sidoarjo untuk terus memperjuangkan hak masyarakat dalam mendapatkan hidup setara dan sejahtera. Termasuk di dalamnya untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.

“Terima kasih atas sinergi, kolaborasi dan kontribusi semua pihak dalam menyediakan perumahan untuk masyarakat. Dengan menciptakan iklim yang kondusif mudah mudahan pelaksanaan program program pembangunan di Sidoarjo dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Nuri)



Wujudkan Clean Government and Good Governance

Editor: Fathur Roziq

16 Okt 2024 16:23



Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Irjen Pol Didik Agung Widjanarko (kiri) berbincang dengan Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono, serta legislator Partai Gerindra Supriyono. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Politik & Pemerintahan



Aa

AA

KETIK, SIDOARJO – DPRD Sidoarjo mengambil peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean government and good governance*). Selasa (15 Oktober 2024), DPRD Sidoarjo menjadi tuan rumah rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pejabat-pejabat Pemkab Sidoarjo dihadirkan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo Abdillah Nasih menyatakan informasi tentang kehadiran tim KPK itu diterimanya terkait *monitoring center for prevention* atau MCP. MCP ini merupakan wujud program kolaborasi dari KPK yang bertujuan mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi dengan tujuan menciptakan tata kelola pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi.

"MCP ini dilakukan serentak di Indonesia. Saya minta kegiatan itu diadakan di Kantor DPRD Sidoarjo. Bu Sekda (Fenny Apridawati) saya minta menghadirkan OPD (organisasi perangkat daerah)," kata Abdillah Nasih yang ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (15 Oktober 2024).

Tujuan DPRD Sidoarjo, lanjut dia, secara umum adalah bersama-sama menciptakan *clean government and good governance*. Prinsipnya, DPRD Sidoarjo dan Pemkab Sidoarjo menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pemerintahan.

pelaksanaan pemerintahan.





INFO MEDIA PERS

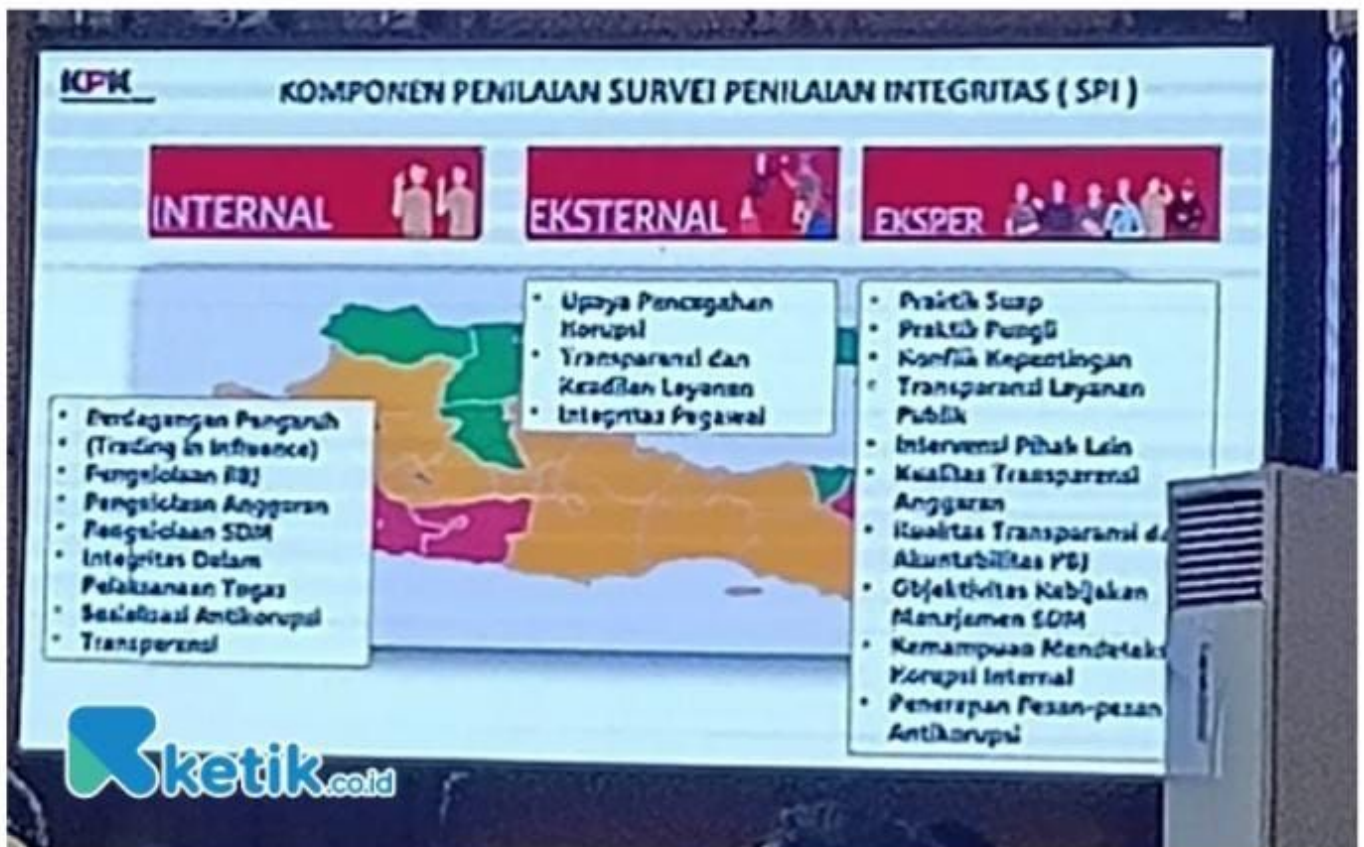
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kehadiran Tim KPK sangat bagus bagi anggota DPRD Sidoarjo. Sebab, selama ini, para legislator di Parlemen Kota Delta itu perlu mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang pencegahan tindakan korupsi.

Tim KPK memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan yang sangat bermanfaat. Di titik mana saja kerawanan tindakan korupsi terjadi. Apa saja permasalahan yang bisa diidentifikasi sebagai rawan korupsi. Indikatornya seperti apa. Termasuk, bagaimana mencegah terjadinya korupsi.

"Dengan bekal ilmu dan teori itu, kita semakin hati-hati. Kepada OPD, fungsi pengawasan dan pencegahan kita tingkatkan," papar Abdillah Nasih.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh seluruh Pimpinan DPRD Sidoarjo. Ketua DPRD Abdillah Nasih, Wakil Ketua DPRD Kayan SH, Wakil Ketua DPRD Suyarno, dan Wakil Ketua DPRD Warih Andono. Begitu pula ketua-ketua komisi dan para anggota.



Paparan materi Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Indeks Integritas bagi Pemerintah Daerah. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Pjs Bupati Sidoarjo M. Isa Anshori datang didampingi oleh Sekda Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati, Kepala Inspektorat Sidoarjo Andjar Surjadianto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo Herry Soesanto, serta kepala-kepala OPD. Mereka mengikuti acara hingga selesai.

Dalam koordinasi dan supervisinya, Tim KPK menyampaikan delapan area yang teridentifikasi rawan terjadinya korupsi. Masing-masing perencanaan, penganggaran, pengadanan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP (aparatur pengawasan internal pemerintah), manajemen ASN (aparatur sipil negara), optimalisasi pajak daerah, serta pengelolaan barang milik daerah.

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Irjen Pol Didik Agung Widjanarko mencontohkan, kasus korupsi yang sering terjadi di lingkungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, antara lain, penyuapan. Pengadaan barang dan jasa dengan modus *mark up* harga. Di delapan area rawan tersebut perlu intervensi.

"Di mana pun area itu, di situ rawan, makanya kita mengajak seluruh pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah pencegahan," tegas Didik Agung Widjanarko.

Kedatangan KPK di Sidoarjo, kali ini, tidak terkait kasus atau apa pun. Anggota DPRD Sidoarjo dan DPRD di berbagai daerah baru dilantik menjadi anggota dewan. Mereka perlu diberi penguatan tentang bagaimana mencegah terjadinya korupsi. Begitu pula pemerintah daerahnya. DPRD dan Pemkab Sidoarjo harus saling menguatkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

"Perlu sinergi yang baik antara DPRD dengan pemerintah daerah," tambah Didik Agung Widjanarko.

DPRD dan pemerintah daerah diwajibkan melaporkan langkah-langkah pencegahan terkait delapan area rawan korupsi. Ada indikator dan subindikator yang harus dilaporkan. Laporan itu akan dinilai sepanjang tahun. Lebih-lebih, DPRD yang punya wewenang dan tugas pengawasan.

"DPRD harus membantu pemerintah daerah," tandas Didik Agung Widjanarko.

Anggota Satgas Pencegahan Direktorat III Korsup KPK Irawati menambahkan, anggota DPRD memiliki fungsi pengawasan di samping fungsi legislasi dan penganggaran. Instrumen MCP ini bisa dijadikan parameter dan indikator dalam rapat-rapat dengan eksekutif.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

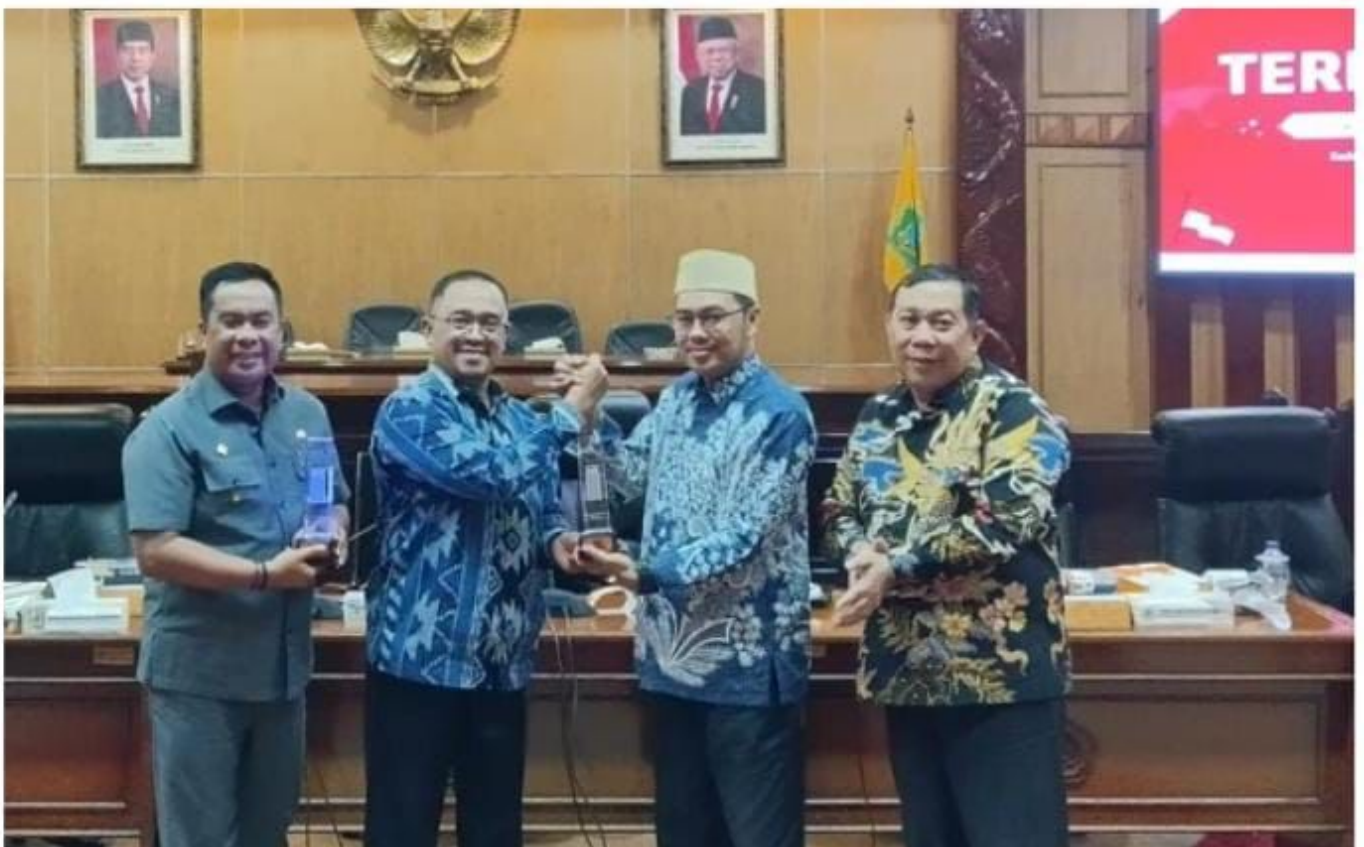
"Misalnya, jangan sampai anggaran OPD besar, tapi lebih banyak titipan pokirnya (pokok pikiran)," kata Irawati.

Begitu pula dalam pengadaan barang dan jasa. DPRD perlu mengakses LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Itu perlu pengawasan. Perhatikan, misalnya, *mandatory spending* yang berkaitan dengan belanja kebutuhan dasar yang sudah diatur undang-undang. Baik belanja sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

"Pastikan belanja terkait *mandatory spending* ini tidak mengandung risiko korupsi. Pastikan hasilnya berkualitas," katanya.

Irawati juga menitip pesan kepada para anggota DPRD Sidoarjo agar membantu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengoptimalkan pendapatan pajak daerah. Baik pajak hotel, hiburan, maupun pajak parkir. Yang saat ini ditangani KPK di Sidoarjo terkait optimalisasi pajak daerah.

"Tolong dibantu pemda, tapi saya titip pesan. Pajak daerah itu itu banyak *fraud*-nya (perbuatan curang)," pesan Irawati.



Penyerahan cendera mata antara Pjs Bupati Sidoarjo Isa Anshori (kiri) dan Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih (dua dari kanan) kepada Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Irjen Pol Didik Agung Widjanarko. (Foto: DPRD Sidoarjo)

Pjs Bupati Sidoarjo M. Isa Anshori menyatakan terima kasihnya atas kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini. Dia berharap angka korupsi di Sidoarjo semakin turun.

"Itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat," ungkapnya.

Dalam sambutannya, Isa Anshori juga menyatakan bahwa rapat koordinasi dengan KPK ini merupakan upaya memperkuat sinergi antara Pemkab Sidoarjo, DPRD Sidoarjo, dan seluruh stakeholders dalam upaya menurunkan angka korupsi di Kabupaten Sidoarjo. Fokus meningkatkan Indeks Integritas dan Monitoring Center Of Prevention (MCP).

"Kami akan memastikan seluruh perangkat daerah bekerja sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan integritas. Targetnya, MCP Sidoarjo harus naik. Begitu juga dengan Indeks Integritas," tegasnya.

Isa Anshori menyebutkan, pada 2023, nilai MCP Sidoarjo mencapai 91. Itu sama dengan rata-rata Jawa Timur yang juga 91. Lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang hanya 75. Adapun Indeks Integritas Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 mencapai 75,90. Turun pada 2023 dengan nilai 75,31.

Isa Anshori berharap angka indeks integritas tersebut bisa meningkat sehingga Kabupaten Sidoarjo masuk 10 besar pada 2024. Sebab, saat ini Kabupaten Sidoarjo masih peringkat ke-21 di Jawa Timur.

"Selain itu, indeks integritas juga harus ikut naik. Dan, *ending* dari upaya ini adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat," katanya. (*)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DOK TIM SAI

DEKLARASI: Achmad Amir Aslichin saat menerima dukungan dari Ikatan Pedagang Pasar Masyarakat Indonesia Prambon di Pasar Rakyat Desa Bendotretek, Prambon.

Mas Lin Siap Perbaiki Kesejahteraan Pedagang

SIDOARJO – Pasangan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) Achmad Amir Aslichin-Edy Widodo (Sae) terus menggalang dukungan dari berbagai elemen, tak terkecuali para pedagang pasar maupun pelaku UMKM.

Mas Lin, sapaan akrab Achmad Amir Aslichin, mengaku mendapat banyak aspirasi dari para pedagang pasar tradisional. "Mereka (pedagang, Red) ingin ada perubahan. Karena itu, kami siap memperjuangkan aspirasi mereka," ujar Mas Lin.

Dia menceritakan, salah satu dukungan itu datang dari Ikatan Pedagang Pasar Masyarakat Indonesia Prambon.

Dukungan para pedagang diberikan secara sukarela, sebab mereka berharap pasangan Sae bisa membawa perubahan positif bagi para pedagang. "Ini tambahan semangat baru untuk membangun Sidoarjo," ujarnya.

Dia menjelaskan, salah satu aspirasi yang diterima dari para pedagang adalah soal perbaikan kesejahteraan. "Mereka ingin usahanya bisa lancar, ramai, dan berkembang," katanya. (uzi/ris)

 Ditulis dengan CamScanner

Jawa Pos

Debat Perdana Dibagi dalam Enam Segmen

SIDOARJO - Debat perdana kontestan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilbup) Sidoarjo 2024 bakal digelar Sabtu (19/10) malam mendatang. Temanya sudah ditetapkan, yakni soal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KPU telah menyelesaikan teknis persiapan pelaksanaan debat edisi pertama itu, termasuk para panelis yang akan dilibatkan. "Debat berlangsung selama dua jam dan terbagi dalam enam segmen," kata Ketua KPU Sidoarjo Fauzan Adim.

Dia menjelaskan, dalam debat tersebut, setiap

pasangan calon (paslon) diberi kesempatan untuk menyampaikan visi misi masing-masing. Mereka juga bakal mengikuti sesi pendalaman visi misi. Setelah itu, seluruh paslon bakal mendapatkan pertanyaan dari panelis, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antar paslon.

Fauzan menambahkan, KPU bakal mengundang lima panelis yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Airlangga (Unair), hingga Universitas Marif Hasyim Latif

(Umaha) Sidoarjo.

KPU juga membatasi jumlah pendukung yang bisa hadir, mengingat lokasi debat berada di salah satu hotel di Sidoarjo. "Antisipasi agar tidak ada tumpukan massa pendukung," katanya.

Untuk mengakomodasi pendukung yang ingin menyaksikan debat, KPU menyediakan fasilitas nonton bareng di alun-alun. KPU juga mengundang jajaran forkopimda dan tokoh masyarakat dari sejumlah organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan lainnya. **(uzi/ris)**

Rencana Debat Perdana Kontestan Pilbup Sidoarjo

- Dilaksanakan pada** Sabtu, 19 Oktober 2024.
- Durasi:** Dimulai pukul 19.00 WIB selama dua jam.
 - Terbagi dalam enam segmen.
- Tema:** Kesejahteraan masyarakat
- Panelis:** KPU menyiapkan lima panelis yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi (baik negeri maupun swasta).

Sumber: KPU Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DOK TIM BAIK

INTERAKTIF: Subandi bersama warga Perumahan Puri Surya Jaya, Gedangan, dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin (14/10) malam.

Subandi Sambangi Warga, Janji Benahi Layanan Dasar

SIDOARJO – Salah satu kegiatan yang cukup sering dilakukan calon bupati (cabup) Subandi adalah mengunjungi masyarakat di wilayah permukiman. Seperti pada Senin (14/10) malam, dia menemui warga Perumahan Puri Surya Jaya, Gedangan.

Di sana, dia bertemu dengan sekitar 150 warga, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, dan ibu-ibu penggerak PKK. Mereka terlibat dalam diskusi interaktif selama lebih dari dua jam.

Dalam pertemuan itu, selain menyampaikan visi-misinya di berbagai sektor, Subandi menjanjikan peningkatan layanan dasar bagi warga Sidoarjo. Salah satunya adalah kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu lewat optimalisasi

gratis bagi masyarakat untuk mengakses layanan BPJS Kesehatan. "Kami akan memberikan akses layanan kesehatan yang lebih baik sehingga tidak ada lagi warga yang kesulitan berobat," ujarnya.

Program lainnya adalah pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan siswa berprestasi serta penyediaan fasilitas belajar yang memadai. Dia juga menjanjikan pembangunan infrastruktur desa yang lebih merata. (uzi/ris)

CS Si Putih dengan Clarification

Jawa Pos

Pjs Bupati Targetkan Angka Korupsi Turun

Sidoarjo, Memorandum

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama DPRD setempat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi, Selasa (15/10). Digelar di ruang paripurna DPRD, rakor mendatangkan narasumber dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjenpol Didik Agung Widjanarko.

Pjs Bupati Sidoarjo Muhammad Isa Anshori mengatakan, langkah ini sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan seluruh *stakeholder* dalam upaya penurunan angka korupsi di Kabupaten Sidoarjo.

Fokusnya peningkatan indeks integritas dan *monitoring center of prevention* (MCP). "Kami akan memastikan bahwa seluruh perangkat daerah bekerja sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan integritas.

Targetnya, MCP Sidoarjo harus naik, begitu juga dengan indeks integritas," ujarnya.

MCP Sidoarjo pada 2023 nilainya sebesar 91 atau sama dengan rata-rata Jawa Timur yang juga 91, atau lebih tinggi dibandingkan nasional yang hanya 75. Sedang indeks integritas di 2022 sebesar 75,90, turun menjadi sebesar 75,31 pada 2023.

Namun, Isa Anshori berharap capaian tersebut bisa meningkat hingga Kabupaten

Sidoarjo masuk 10 besar tahun ini. Sebab saat ini Kabupaten Sidoarjo masuk peringkat ke-21 dari 38 kota/kabupaten di Jatim.

"Paling tidak masuk 10 besar dalam mencapai peningkatan pemberantasan korupsi, atau naik signifikan dari tahun 2023 lalu. Selain itu, indeks integritas juga harus ikut naik. Dan ending dari upaya ini adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Irjenpol Didik Agung Widjanarko menjelaskan, jenis kasus korupsi yang sering terjadi di lingkungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat meliputi penyuapan dan pengadaan barang dan jasa. "Kasus yang masih sering kami jumpai ada-

lah penyuapan, kemudian pengadaan barang dan jasa dengan modus seperti *markup* harga dan keterlibatan dalam pelaksanaan proyek dengan swasta," jelasnya.

Senada, anggota Satgas Pencegahan Direktorat III Korpus KPK, Irawati menjabarkan 7 fokus potensi risiko korupsi. Di antaranya, perencanaan, penganggaran, manajemen ASN, pajak daerah, pelayanan publik, pengadaan dan barang milik daerah. "Untuk itu, rakor ini kami laksanakan agar tidak terjadi upaya korupsi pada perencanaan dan penganggaran APBD tahun 2025. Mari kita bersama-sama melakukan pencegahan korupsi demi mewujudkan *good government*," ajaknya. (adv/kri/jok/epe)



Pjs Bupati M Isa Anshori saling jabat komando dengan Irjenpol Didik Agung Widjanarko usai rakor pemberantasan korupsi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo.

CS Si Putih dengan Clarification

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

SATU RANGKAIAN KONFERCAB KE-XV PC GP ANSOR GELAR TOURNAMEN FUTSAL

Sidoarjo, Pojok Kiri

Salah satu rangkaian kegiatan Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XV PC GP Anzor Sidoarjo 2024 di antaranya menyelenggarakan Turnamen Futsal, karena kegiatan Konfercab tersebut merupakan momentum penting dalam keberlanjutan organisasi yang memiliki beberapa tujuan, diantaranya Mengembangkan potensi kapasitas kepemimpinan kader.

Pengembangan potensi minat dan bakat yang di gagas oleh GP Anzor Sidoarjo dilakukan melalui berbagai program Unit Kegiatan positif tersebut penalarannya ialah Menyadari akan pentingnya pengembangan terhadap minat dan bakat di dalam organisasi sehingga melahirkan kader yang terus berkreasi untuk kemudian mampu menghasilkan prestasi, hal tersebut sesuai dengan Visi GP Anzor Sidoarjo diantaranya ialah "Meningkatkan pengkaderan" Sehingga memberikan sebuah motivasi bagi anggota serat memberikan peluang bagi mereka seperti mengikuti turnamen Futsal yang mampu memberikan pacuan untuk terus berprestasi.

Turnamen Futsal yang



di selenggarakan GP Anzor Sidoarjo hari Senin (14/10) resmi di buka di gedung serbaguna GOR Sidoarjo dengan di hadiri oleh ketua umum KONI Sidoarjo M. Franky Effendi, serta seluruh pengurus GP Anzor yang terdiri 18 PAC dan 6 Banom.

Saat memberikan kepada media ketua umum KONI Sidoarjo M. Franky Effendi, menerangkan" Menurut kami Kegiatan ini sangat luar biasa walaupun pesan dari pengurus kegiatan ini sifatnya hanya penggem-bira saja, tetapi kegiatan ini

bukan kegiatan yang sepele, karena kegiatan ini merupakan nafas olahraga salah satunya futsal,"terangnya.

Franky juga menambahkan" Di Kabupaten Sidoarjo sendiri olahraga futsal sering menoreh prestasi khususnya di porprov dan Alhamdulillah kegiatan Pekan olahraga Provinsi kemarin ada 6 atlet dari sidoarjo mendapatkan medali perak, tentunya untuk mendapatkan medali tersebut di butuhkan latihan yang srius" Tambahnya.

Di tempat yang sama Sekretaris PGP Anzor

Pimpinan Cabang Sidoarjo Moh Fif'an Arif Abbas menjelaskan" Kegiatan ini merupakan kegiatan hiburan untuk mengasah minat bakat para pemuda anzor, tetapi kegiatan ini juga untuk menumbuhkan aspirasi bagi atlet yang ada di sidoarjo, secara ekstrim kalau organisasi NU (Anzor) saja mau menyelenggarakan apalagi seperti beliau (M.Franky Effendi-red) selaku ketua umum KONI tentu penggeliat turnamen Futsal yang terdiri dari 24 Team yang terdiri 18 PAC dan 6 Banom

sangat ber semangat artinya mereka meng aspirasikan bahwasanya olahraga itu merupakan bagian dari kebutuhan" Jelasnya.

Di akhir penjelasan Rif'an juga menegaskan" Acara ini tidak hanya untuk bersaing di lapangan, tetapi juga sebagai bentuk silaturahmi dan kebersamaan, Kami selaku pengurus berharap kegiatan ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi para pemuda Anzor untuk terus berkembang, baik dalam bidang olahraga maupun social," tegasnya. (Nang)

CS | Dibuat dengan CamScanner

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

Jembatan Kedungpeluk Ditargetkan Rampung Akhir November

CANDI-Jembatan bailey di Kedungpeluk Kecamatan Candi telah kembali beroperasi setelah sempat ditutup dari Senin (7/10) hingga Sabtu (12/10). Untuk pemasangan double U box sudah selesai dan kendaraan kini bisa melintas.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo menutup akses jembatan sementara untuk memastikan keselamatan selama proses clearing. Penutupan berlangsung hanya enam hari untuk pemasangan tiang pancang dan double U box.

Kepala DPUBMSDA Sidoarjo, Dwi Eko Saptono mengatakan, pemasangan tiang pancang dan DUB telah selesai.

"Hanya berlangsung enam hari untuk

pemasangan tiang pancang dan DUB, Alhamdulillah sudah selesai," ucapnya, Rabu (16/10).

Selesai pemasangan, jembatan bailey atau jembatan sementara yang ada di lokasi dapat digunakan kembali. Saat ini petugas sedang menyelesaikan bagian permukaan jembatan permanen.

"Jembatan permanen tersebut dibangun karena jembatan Kedungpeluk ambruk pada 16 Juli lalu," ujarnya.

Selama periode pembangunan, warga setempat menggunakan jembatan sementara untuk beraktivitas. Jembatan permanen nantinya memiliki lebar tujuh meter dan panjang 21 meter.

"Saat jembatan permanen selesai dibangun, jembatan bailey milik Provinsi Jawa Timur akan dibongkar," jelasnya.

● Ke Halaman 10



DIKERJAKAN: Jembatan permanen Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi dalam proses pembangunan.

M SAIFUL FOKHAN/RADAR SIDOARJO

CS Bermitra dengan Comptroller



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Jembatan Kedungpeluk...

”Target kami akhir bulan depan jembatan permanen ini sudah tuntas 100 persen dan bisa digunakan,” tutupnya.

Pembangunan jembatan diharapkan dapat meningkatkan akses bagi masyarakat. Dengan selesainya pembangunan jembatan permanen diharapkan tidak ada lagi kendala transportasi. (sai/vga)



KPU Siapkan Debat Perdana Cabup-Cawabup

KOTA-Debat pertama Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo akan berlangsung di Favehotel, Sabtu (19/10). Kegiatan direncanakan

berlangsung selama dua jam, mulai pukul 19.00



M SAIFUL ROHMANRADAR SIDOARJO

PERSIAPAN: Ketua KPU Sidoarjo, Fauzan Adhim.

ningga 21.00.

Ketua KPU Sidoarjo Fauzan Adhim mengatakan, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subandi-Mimik Idayana dan Achmad Amir

Aslichin-Edy Widodo akan mengikuti debat. Debat tersebut akan terdiri dari enam segmen yang telah ditentukan.

"Segmen pertama akan mencakup pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi misi masing-masing pasangan calon, selanjutnya, segmen kedua dan ketiga akan membahas lebih dalam mengenai visi misi yang telah disampaikan," ucapnya.

"Baru di segmen keempat dan kelima ada pertanyaan dari panelis dan tanya jawab dari paslon, dan segmen keenam akan menjadi bagian penutup dari keseluruhan debat," imbuhnya.

KPU Sidoarjo juga mengatur

kehadiran peserta di arena debat. Masing-masing pasangan calon diizinkan membawa perwakilan dari partai pengusung dan 20 orang pendukung.

● **Ke Halaman 10**

CS Copyright © 2015

 **RADAR**
SIDOARJO.ID



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KPU Siapkan Debat...

Selain itu, KPU juga akan mengundang Forkopimda dan tokoh masyarakat. Seperti Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Sidoarjo dan Ketua Muhammadiyah Sidoarjo.

"Kami berharap semua paslon bisa mentaati aturan tersebut dengan tidak membawa pendukungnya ke lokasi debat," jelasnya.

Untuk menghindari kerumunan massa pendukung, KPU Sidoarjo menghimbau pasangan calon untuk

menggelar nonton bareng di posko masing-masing. Supaya para pendukungnya dapat menyaksikan acara debat.

"Pemkab Sidoarjo juga rencananya menggelar nonton bareng di Alun-alun, jadi para simpatisannya bisa melihat acara debat," pungkasnya. (sai/vga)



Cabup Paslon No 2 Didukung Pedagang Pasar Prambon

KOTA-Ikatan Pedagang Pasar Masyarakat Indonesia resmi deklarasi menyatakan dukungan mereka kepada pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Achmad Amir Aslichin-Edy Widodo (SAE).

Deklarasi ini digelar di pasar rakyat Desa Bendotretek, Kecamatan Prambon.

Para pedagang yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Pasar Masyarakat Indonesia menegaskan bahwa dukungan tersebut diberikan secara sukarela oleh para pedagang yang menginginkan perubahan di Kabupaten Sidoarjo, khususnya Prambon.

Para pedagang, menyatakan keyakinannya bahwa pasangan Mas lin dan Abah Edy akan membawa perubahan positif bagi para pedagang. Ia menyebut pasangan ini sebagai sosok yang sederhana dan dekat dengan rakyat kecil, termasuk pedagang keliling.

Calon Bupati Mas lin dan Abah Edy, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyam-



APRESIASI: Cabup Mas lin dan Cawabup Abah Edy saat bertemu dengan pedagang pasar Prambon.

but baik dukungan yang diberikan oleh para pedagang.

Menurutnya, keinginan para pedagang mencerminkan harapan besar masyarakat untuk perubahan.

"Dukungan ini memacu semangat kami untuk membawa Sidoarjo lebih baik. Pedagang ingin ada perubahan, dan kami

siap memperjuangkan aspirasi mereka," kata Mas lin.

Ia juga memastikan bahwa jika terpilih, Mas lin dan Abah Edy akan membangun kesejahteraan para usaha kecil dan pedagang. "Kami berkomitmen memenuhi keinginan para pedagang untuk menyamakan kesejahteraan," tegasnya. (dik/vga)



Cabup Subandi Bikin Simpati Warga Perumahan Puri Surya Jaya

KOTA-Suasana penuh kehangatan menyelimuti pertemuan antara Calon Bupati Sidoarjo Subandi, dengan warga Perumahan Puri Surya Jaya Gedangan.

Di tengah ramainya dukungan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Subandi-Mimik (BAIK), Subandi kembali mendapat simpati dari warga setempat dalam sebuah diskusi interaktif yang digelar di salah satu rumah makan di kawasan tersebut.

Subandi didampingi oleh Yasin, salah satu tokoh agama setempat, sekaligus puluhan tokoh masyarakat, termasuk Ketua RW, RT, takmir masjid, serta pemuda Karang Taruna. Subandi dengan ramah dan penuh semangat membahas visi dan program kerjanya untuk membangun Kabupaten Sidoarjo ke depan, yang berhasil menarik perhatian warga.

Dalam kesempatan tersebut, Subandi menjelaskan 14 program unggulan yang diusung pasangan BAIK. Beberapa program prioritas di antaranya pen-



KOMPAK: Cabup Subandi bertemu warga Perumahan Puri Surya Jaya.

ciptaan 100.000 lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, kelanjutan proyek betonisasi, pemberian beasiswa kepada anak yatim-piatu serta santri dan mahasiswa, layanan kesehatan gratis melalui BPJS, serta insentif bagi tenaga pendidik seperti guru ngaji, guru TK hingga SMP, dan tenaga kesehatan.

Program lain yang juga mendapat perhatian adalah penye-

diaan makanan bergizi gratis untuk siswa TK hingga SMP, bedah warung untuk mendukung 2.000 unit usaha kecil setiap tahun, serta bantuan UMKM dan BKK sebesar Rp 500 juta untuk setiap desa dan kelurahan. Selain itu, Subandi menekankan pentingnya UKM naik kelas, serta pengembangan pusat kreatif bagi anak muda dan kemudahan perizinan usaha. (sai/vga)

CS Dipindai dengan CamScanner

MARAK REKLAME TAK KANTONGI PERIZINAN, DIDUGA DINAS TERKAIT TUTUP MATA

Sidoarjo, Pojok Kiri

Maraknya reklame bodong seperti billboard di Kota Delta Mendapat sorotan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo.

Seperti titik reklame yang berada di perbatasan Sidoarjo-Surabaya, masuk wilayah Kecamatan Waru atau dekat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Kampus 2.

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian (Kasi Ops) Kabupaten Sidoarjo Satpol PP, R. Novianto mengatakan jika pihaknya sudah melakukan penyelidikan di wilayah perbatasan Sidoarjo-Surabaya ada dua indikasi pendirian reklame belum ada ijinnya.

"Sehingga kami dengan tim reklame sepakat akan segera melakukan tindakan tegas dengan penertiban jika izin pendirian reklame tidak dikantongi. Tahapan-tahapan SOP sesuai dengan Permendagri 23 Pol PP, sudah menerbitkan surat teguran pertama maupun teguran penyegelan yang ada di wilayah Gunung Anyar perbatasan Surabaya-Sidoarjo yang ada di atas sungai," Ujar R. Novianto kepada awak media, Selasa 15 Oktober 2024.

Ternyata diketahui pendirian reklame diduga menyalahi aturan karena berdiri diatas trotoar dan di jembatan sungai. Dua perusahaan reklame yang melanggar yakni, dari CV.777 dan PT DNA.



Reklame bodong tampak tetap berdiri.

Ditenggarai proses perijinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) Sidoarjo, belum dimiliki oleh pihak perusahaan reklame. Pihak CV.777 hanya menunjukkan surat Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Akan tetapi, surat tersebut belum mengindikasikan rekomendasi mendirikan reklame. Langkah-langkah utama yakni pendirian reklame di dinas perijinan belum dikantongi," Kata Novianto.

Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Sidoarjo, Rudy Setiawan membenarkan ada reklame bodong yang sudah berdiri di wilayah perbatasan Sidoarjo-Surabaya tersebut. Terpantau belum ada ijin pendirian reklame saat di konfirmasi via Whats App.

Informasi dihimpun Redaksi Koran Harian Pojok Kiri ketika melakukan wawancara dengan Pak Abi sebut saja Tokoh masyarakat

Sidoarjo, juga sebagai pemerhati kebijakan, pihaknya menaruh kecurigaan ada pihak yang bermain. Tiba-tiba ada reklame yang berdiri di kawasan perbatasan Sidoarjo-Surabaya lengkap dengan materi iklannya.

Ada apa dengan ini, siapa orang kuat yang bermain papan reklame berukuran besar 4x8 meter tanpa dilengkapi dengan perizinan. Jika perlu, kita dorong APH

bergerak karena ini jelas Sidoarjo dirugikan dalam hal pemasukan pajak," Turtunya.

Belum jelas keluar perizinannya kok sudah berdiri siapa orang kuat yang bermain di papan reklame ini? saya menduga ada proses peninjauan lapangan tidak dilakukan. Jika proses tinjau lapangan sudah dilakukan tidak mungkin bisa sampai lolos sehingga reklame raksasa berdiri," tegas Abi. (Lie/Khol/Bersambung)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



LOETIYUDATA

Jajaran Satlantas turun edukasi masyarakat Rabu (16/10/24)

Satlantas Edukasi Turun ke Jalan

SIDOARJO -- Dua hari pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2024 sejak dimulai tanggal 14 sampai dengan 27 Oktober 2024 digencarkan, Satlantas Polresta Sidoarjo salah satunya melalui upaya Preemptif turun ke jalan sapa pengendara.

Jajaran anggota Polisi Lalu Lintas di wilayah hukum Polresta Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan humanis menyapa serta mengedukasi masyarakat khususnya pengendara motor. Bahwa mematuhi peraturan tertib berlalu lintas, adalah upaya guna mencegah terjadinya faktor kecelakaan lalu lintas.

Disampaikan Kanit Kamsel Satlantas Polresta Sidoarjo AKP Latifa Andika, untuk menggaungkan pelaksanaan Operasi

Zebra Semeru 2024 pihaknya masif turun ke jalan; pusat keramaian, sekolah, Alun-alun dan sebagainya dengan mengedukasi masyarakat.

Masyarakat maupun pengendara kami edukasi segala hal berkaitan tertib berlalu lintas. Seperti dilarang berboncengam lebih dari satu orang, berkendara melebihi batas kecepatan, berkendara melawan arus dan lainnya,” ujar AKP Latifa Andika, Rabu (16/10/24).

Hal sama juga diutarakan Kasatgas Preemptif Operasi Zebra Semeru 2024 Satlantas Polresta Sidoarjo Iptu Ayudina Prakasa.

“Bahwa sosialisasi serta edukasi yang dilakukan dengan menggandeng generasi muda, harapannya dapat menjadi teladan budaya tertib lalu lintas bagi lainnya,”ujarnya. ● **Loe**

KPU Jadwalwalkan 3 Kali Debat Publik Pilkada 2024: Perdana 19 Oktober

SIDOARJO (BM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo berencana menggelar debat publik atau debat terbuka perdana antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo di Pilkada 2024.

Ketua KPU Sidoarjo, Fauzan Adhim, mengatakan, bahwa jadwal debat perdana akan dilakukan pada 19 Oktober 2024 mendatang. "Debat pertama, insyaAllah, akan dilaksanakan pada 19 Oktober 2024," kata Fauzan Adhim saat dikonfirmasi, Senin (14/10).

Fauzan menambahkan, untuk pelaksanaan debat antara paslon Subandi-Mimik dan Mas lin-Edy akan digelar di Sidoarjo, bukan di

Surabaya seperti saat Pilkada 2020 lalu. "Kalau tempatnya akan dilaksanakan di Sidoarjo. Untuk lokasi pastinya masih belum ditetapkan," ujarnya.

Untuk tema debat perdana kali ini, KPU Sidoarjo masih belum memutuskan tema apa yang akan dijadikan materi debat. Sebab, saat ini, masih dilakukan pembahasan.

Format debat juga sedang dibahas bersama antara KPU Sidoarjo dan kedua tim pasangan calon BAIK (Subandi-Mimik) dan SAE (Mas lin-Edy). "Nanti, materi debatnya kami serahkan kepada tim perumus. Yang jelas, KPU menjadwalkan tiga kali debat," ujarnya.

Menurut Fauzan, tujuan dari pelaksanaan debat publik ini adalah untuk menyebarluaskan profil, visi, dan misi. Serta, program kerja para paslon agar bisa memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat.

Harapannya, melalui debat kandidat ini, bisa dijadikan salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya dan menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam kampanye debat publik atau debat terbuka antar paslon. "Kami berharap pada pelaksanaan debat kali ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun," tutupnya. (udi)



PENGAMBILAN NOMOR: Pasangan calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo Subandi-Mimik Idayana dan Mas lin-Edy Widodc mengambil nomor urut di KPU Sidoarjo



BM/157

Pjs Bupati Sidoarjo, Muhammad Isa Anshori

Pemkab Sidoarjo Perkuat Sinergi dengan Fokus Penurunan Korupsi dan Peningkatan MCP

SIDOARJO (BM) - Sebagai upaya menekan korupsi di Kabupaten Sidoarjo, Pjs Bupati bersama DPRD Sidoarjo menggelar rapat koordinasi.

Kegiatan tersebut dilakukan di gedung paripurna DPRD Sidoarjo pada Selasa (15/20), dengan mendatangkan narasumber Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati Sidoarjo, Muhammad Isa Anshori, mengatakan bahwa pemerintah daerah akan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk menekan angka korupsi di Kabupaten Sidoarjo.

Oleh karena itu, langkah strategis tersebut juga diharapkan dapat mendorong peningkatan Indeks Integritas dan kinerja Monitoring Center of Prevention (MCP). "Kami akan memastikan bahwa seluruh perangkat daerah bekerja berdasarkan prinsip akuntabilitas dan integritas. Targetnya jelas, MCP Sidoarjo harus meningkat, demikian juga dengan Indeks Integritas," ungkap Isa.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan stake-

holder terkait disebut menjadi kunci dalam upaya ini. Pemerintah berkomitmen memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan secara transparan dan terukur demi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Pada tahun 2023, nilai MCP Sidoarjo mencapai 91, setara dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur yang juga berada di angka 91, serta lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang hanya 75.

Sementara itu, Indeks Integritas Sidoarjo mengalami sedikit penurunan, dari 75,90 pada 2022 menjadi 75,31 pada 2023. "Paling tidak Sidoarjo masuk 10 besar dalam mencapai peningkatan pemberantasan korupsi, atau naik signifikan dari tahun 2023 lalu," ujar Isa.

Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan birokrasi yang bebas dari praktik korupsi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Irjen Pol Didik Agung Widjanarko men-

jelaskan, jenis kasus korupsi yang sering terjadi di lingkungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang meliputi penyuaipan dan pengadaan barang dan jasa.

"Kasus yang masih sering kami jumpai adalah penyuaipan, kemudian pengadaan barang dan jasa dengan modus seperti mark up harga dan keterlibatan dalam pelaksanaan proyek dengan swasta," tutur Didik.

Hal tersebut juga senada dengan Anggota Satgas Pencegahan Direktorat III Korsup KPK, Irawati, dirinya memaparkan bahwa ada 7 fokus potensi resiko korupsi.

Diantaranya, perencanaan, penganggaran, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pajak daerah, pelayanan publik, pengadaan, dan barang milik daerah.

Oleh karena itu, upaya ini dilakukan agar tidak terjadi upaya korupsi pada perencanaan dan penganggaran APBD tahun 2025. "Mari kita bersama-sama memperkuat upaya pencegahan korupsi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas," pungkas Didik. (adv/udi)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Pjs Bupati Sidoarjo, M. Isa Anshori, didampingi Sekda dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo, saat dimonitoring dan evaluasi oleh komisi informasi Jatim.

ali kusyanto@bhirawa

Komisi Informasi Jatim Apresiasi Kemajuan PPID

Sidoarjo, Bhirawa

Anggota Komisi Informasi (KI) Jatim, Sholahudin, mengapresiasi kemajuan dari para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang telah ada Kabupaten Sidoarjo. Karena dinilai terdapat lompatan peningkatan pelayanan informasi publik di Kabupaten ini.

Maka itu dirinya berharap komitmen tersebut agar terus berlanjut. Sholahudin juga minta ada kolaborasi dengan pihak-pihak lain, dalam upaya peningkatan pelayanan informasi publik di Kabupaten Sidoarjo.

Hal tersebut disampaikan Sholahudin, Selasa (15/10) kemarin, ketika KI Jatim

melakukan Monev terhadap PPID Sidoarjo yang dilakukan secara online. Dipimpin langsung oleh Pjs Bupati Sidoarjo, M. Isa Anshori, yang juga didampingi Sekdakab, Feny Abridawati dan Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo, Noer Rochmawati, di ruang Sidoarjo Comand Center (SCC) Sidoarjo. Di Kabupaten Sidoarjo, kata Pis Bunati

M. Isa Anshori, untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat yang transparan, akuntabel dan responsif, saat ini terdapat 51 PPID Pelaksana di setiap OPD.

"Mereka siap melayani informasi publik kepada masyarakat. Ini menjadi komitmen bersama seluruh anggota PPID Kabupaten Sidoarjo," kata Isa.

Kabupaten Sidoarjo gerak cepat dalam program PPID tersebut, mulai dari pembentukan Tim Percepatan DIP, Tim Percepatan Pengembangan Inovasi Aplikasi Pelayanan Informasi Publik, Transformasi Website PPID Utama dan Standarisasi Menu PPID pada 51 Website PPID Pelaksana hingga

Website Desa serta Tim Percepatan Fasilitas domain desa.id dan Website Desa.

"Bahkan hingga pendampingan pelatihan pengelolaan konten website desa kepada 346 desa dan kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo," katanya.

Badan publik ini di Kabupaten Sidoarjo, kata Isa, telah menjadi element penting.

Selain karena komitmen pimpinan juga adanya dukungan kebijakan dengan terbitnya Perbup No 98 tahun 2018 dan surat Keputusan Bupati.

"Karena komitmen itu, saat ini pelayanan PPID sudah sampai desa," kata Isa. Dinas Kominfo Sidoarjo sebagai lead-

ing sektor program PPID, telah melakukan pendampingan kepada PPID Desa. PPID Kabupaten Sidoarjo selama ini telah melatih perangkat desa untuk dapat melayani kebutuhan informasi kepada masyarakat. Saat ini ada sekitar 100 desa yang telah dilatih. Kedepan pelatihan PPID kepada seluruh perangkat desa akan dilakukan secara masif.

Tidak hanya itu, penguatan pengelolaan informasi publik di Sidoarjo, juga akan dilakukan sosialisasi PPID, ke kampus-kampus. Hal tersebut untuk memperluas jangkauan pelayanan kebutuhan informasi kepada masyarakat. [kus.ca]

CS

HARIAN
Bhirawa

Warta Digital Bhirawa Online